

Konsekuensi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat

Victor Rumere*, Ted M. Suruan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Article History:

Received: October 20, 2021

Accepted: December 22, 2021

*Corresponding Author:

E-mail:

victor.rumere@gmail.com

Abstract

One of the various mechanisms for intergovernmental fiscal transfers is to reduce regional fiscal limitations such as special allocation funds. Special allocation funds are intended to improve community welfare and accelerate regional economic growth. The aim of this research is to analyze the effect of special allocation funds on economic growth in West Papua. The study used district/city level panel data in West Papua from 2017 to 2021. Data were analyzed using a random effect model and processed with Stata software version 16. The results showed that special allocation funds had a significant effect, but had the opposite direction and/or negative relationship on economic growth in West Papua.

Keywords: *Intergovernmental fiscal transfers, Special autonomy funds, Economic growth, West Papua*

Abstrak

Satu dari berbagai mekanisme transfer fiskal antar pemerintahan yaitu mengurangi keterbatasan fiskal daerah seperti halnya dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Penelitian menggunakan data panel level kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2017 s.d 2021. Data dianalisis menggunakan random effect model dan diolah dengan software stata versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan, namun memiliki arah hubungan yang berlawanan dan /atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Kata kunci: Transfer fiskal antarpemerintahan, Dana alokasi khusus, Pertumbuhan ekonomi, Papua Barat

PENDAHULUAN

Praktik transfer dana yang dilakukan Indonesia sejak orde lama mengalami perubahan drastis pasca reformasi 1998. Awalnya, penyerahan kewenangan hanya terbatas pada tingkat provinsi. Namun kemudian pada era reformasi lebih difokuskan pada tingkat kabupaten/kota. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat disertai dengan transfer dana (money follow function), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari

kebijakan transfer dana dari pusat ke daerah, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan sosial (Chyi & Zhou, 2014; Hyman, 2017; Kirabo Jackson et al., 2016; Lafortune et al., 2018; Rumere, 2022a; Rumere et al., 2022).

Satu dari berbagai mekanisme transfer yang bersifat khusus adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Pusat berperan penting dalam menentukan penggunaan DAK guna pemenuhan pelayanan dasar (Apriliani & Khoirunurrofik, 2020; Rumere et al., 2022), serta kegiatan yang merupakan urusan dan /atau kewenangan daerah dalam rangka mendorong prioritas nasional (Litschig & Morrison, 2013). Sebagai kasus khusus, Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerima dana transfer bersyarat atau lebih dikenal dengan DAK. Sejak tahun 2017, tercatat jumlah transfer DAK yang diterima oleh Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan hingga mencapai 84,13 persen.

Penerimaan DAK diperuntukkan oleh daerah untuk membiayai beberapa urusan seperti infrastruktur jalan, irigasi, kehutanan, kesehatan, bidang kelautan dan perikanan, bantuan operasional sekolah (BOS) tingkat sekolah dasar, bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), membiayai tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, serta bantuan operasional kesehatan. Diharapkan dengan adanya alokasi pembiayaan tersebut dapat mendorong perekonomian di daerah yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal (Rumere, 2022b; Sugiyanto et al., 2018).

Sebagai misal di tahun 2017 s.d 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi di Papua Barat polanya menunjukkan fluktuatif pada 5 tahun terakhir. Berdasarkan sektor lapangan usaha, industri pengelolaan memberikan sumbangan terbesar selama periode 2017 s.d 2021 dengan rerata per tahun yaitu 26,39 persen terhadap perkembangan perekonomian di Papua Barat. Urutan kedua dan ketiga masing-masing diikuti oleh sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Faktanya, pasca tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang menunjukkan potret ekonomi lokal, justru mengalami pertumbuhan yang melambat dari 6,24 persen (tahun 2018) menjadi -0,51 persen (tahun 2021). Keadaan tersebut memotivasi penulis untuk menganalisis, apakah transfer umum yang diterima Provinsi Papua Barat dalam bentuk DAK berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Papua Barat.

Tabel 1. Perkembangan DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat Tahun 2017 s.d 2021.

Tahun	Anggaran DAK (Rupiah)	Realisasi DAK (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2017	92.376.080.000	92.376.080.000	4,02
2018	501.422.363.000	489.419.961.083	6,25
2019	421.841.623.000	338.947.588.991	2,66
2020	457.641.469.000	444.560.372.560	-0,76
2021	581.983.057.000	491.563.793.534	-0,51

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Di Indonesia, beberapa studi empiris terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara transfer DAK yang diterima daerah terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi (Arina et al., 2019; Edo et al., 2020; Jannah & Nasir, 2018; Nurkhyat et al., 2018; Siswiyanti, 2017; Talangamin et al., 2019). Namun penelitian lainnya justru menunjukkan hasil yang berbeda, dimana transfer umum yang diterima daerah dalam bentuk DAK belum dan /atau tidak memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (koto, 2016; Siagian, 2018; Sulaeman & Silvia, 2019). Hasil temuan studi terdahulu yang berbeda membuktikan bahwa, masih terdapat *gap* terhadap hasil yang diperoleh. Begitu pula dengan belum banyaknya informasi yang diperoleh melalui studi empiris terkait pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat. Isu *gap* dan kekosongan informasi, memotivasi dilakukannya penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi *gap* dan kekosongan informasi tentang pengaruh transfer umum yang diterima daerah melalui DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang mencakup data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua Barat, dan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Papua Barat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Perwakilan Papua Barat. Periode data yang digunakan yaitu tahun 2017 s.d 2021. Variabel utama penelitian yaitu DAK. DAK pada penelitian ini diartikan sebagai transfer fiskal yang diterima oleh daerah dan dikhususkan untuk membiayai kegiatan prioritas nasional di daerah, yang belum dianggarkan dalam periode tahun fiskal berjalan. Ukuran yang digunakan untuk merepresentasikan DAK yaitu realisasi belanja daerah yang bersumber dari penerimaan DAK dalam satuan rupiah.

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis hubungan sebab akibat (kausalitas), dimana model kausalitas digunakan untuk menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan variasi nilai variabel lainnya. Teknik penelitian menggunakan analisis kuantitatif untuk mengestimasi pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Model empiris untuk mengestimasi pengaruh transfer antarpemerintahan (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, dibangun dari kerangka teori transfer antarpemerintahan. Konsekuensi adanya DAK, daerah akan memiliki efek pendapatan yang lebih tinggi, sehingga penyediaan barang publik akan meningkat (Rumere *et al.*, 2022). Dengan demikian, DAK dapat menjadi salah satu fungsi belanja pemerintah daerah, yaitu belanja modal infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah. Dibandingkan dengan transfer Dana Alokasi Umum (DAU), DAK memiliki dampak lebih besar terhadap belanja pemerintah daerah (Lewis & Smoke, 2017).

Model Empiris

Dana transfer yang diterima pemerintah daerah, akan disalurkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dengan demikian, secara teori tambahan dana transfer yang memadai akan mempengaruhi perluasan output berupa penyediaan barang publik di daerah. Penyediaan barang publik, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi terhadap meningkatkan kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun model empiris untuk mengestimasi pengaruh transfer antarpemerintahan khusus DAK, seperti pada persamaan (1).

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 DAK_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana, Y_t menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada periode t . Sementara operator β_0 didefinisikan sebagai konstanta. Variabel DAK_t menunjukkan belanja daerah yang bersumber dari DAK selama periode t , dan ε merupakan *error term*. Parameter utama yang hendak diestimasi yaitu β_1 yang menunjukkan hubungan variabel DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Parameter β_1 diharapkan dalam penelitian ini signifikan dan menghasilkan arah hubungan searah/positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Arah hubungan positif dan signifikan yang dihasilkan diartikan bahwa belanja daerah yang bersumber dari DAK dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Kinerja pertumbuhan ekonomi di Papua Barat tidak hanya dipengaruhi oleh transfer antarpemerintahan yang bersifat khusus seperti DAK, namun juga dipengaruhi oleh beberapa sumber pembiayaan yang berasal dari transfer antarpemerintahan seperti Dana Otonomi Khusus (DOK) dan DBH Minyak dan Gas. Manakala komponen DOK dan DBH Minyak dan Gas diabaikan dalam proses analisis, dapat berpotensi *bias* pada koefisien variabel utama yang dihasilkan. Konsekuensinya, hasil estimasi menjadi tidak konsisten dan nilai koefisien yang diperoleh kurang tepat untuk merepresentasikan pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (Gertler et al., 2016). Meminimalisir potensi *bias* yang terjadi, maka kontrol akan dilakukan terhadap penerimaan transfer di daerah yang berasal dari DOK dan DBH, yang diakomodir melalui γ_t . Variabel γ_t merupakan vektor karakteristik untuk mengontrol transfer antarpemerintahan berupa DOK dan DBH Minyak dan Gas, yang diasumsikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, seperti yang terlihat pada persamaan (2).

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 DAK_t + \beta_2 \gamma_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pola belanja pemerintah yang bersumber dari penerimaan transfer, namun juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk di suatu wilayah, kualitas sumber daya manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kegiatan investasi di daerah (Arsyad, 2015; Rumere, 2022b). Agar hasil estimasi dari variabel utama yang dihasilkan melalui proses regresi konsisten dan diyakini dapat mempengaruhi variabel terikat (pertumbuhan ekonomi), maka perhatian juga diarahkan untuk mengontrol variabel-variabel seperti jumlah penduduk ($pddk_t$), kualitas sumber daya manusia (IPM_t), angka partisipasi angkatan kerja ($labor_t$), dan kegiatan investasi yang masuk di daerah ($PMTB_t$). Mengikutsertakan variabel $pddk_t$, IPM_t , dan $labor_t$ serta $PMTB_t$ ke dalam persamaan (3), diasumsikan *error* telah *random* dan parameter β_1 tidak lagi *bias*.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 DAK_t + \beta_2 \gamma_t + \beta_3 pddk_t + \beta_4 IPM_t + labor_t + PMTB_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

Teknik Estimasi Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik estimasi model regresi data panel, guna menentukan model estimasi data panel yang tepat untuk digunakan. Umumnya terdapat tiga pendekatan dengan model regresi data panel. Pertama, *common effect model* (CEM). Model *common effect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel (Baltagi, 2013). Model ini merupakan model paling

seederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya, dan tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu, karena memiliki *intercept* yang tetap dan bukan bervariasi secara random.

Kedua, ***fixed effect model (FEM)***. Model Fixed Effect adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Baltagi, 2013). Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Ketiga, ***pendekatan random Effect model (REM)***. *Random effect* disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Baltagi, 2013). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Baltagi (2013) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian.

Menentukan model estimasi terbaik antara CEM, FEM, dan REM, umumnya menggunakan dua teknik estimasi model. Pertama, uji Chow yang digunakan untuk memilih penggunaan model regresi data panel antara FEM dengan CEM. Pada uji Chow, jika nilai $\text{prob} > \chi^2$ atau (p-value) yang diperoleh $<$ nilai alpha (taraf signifikan), maka model terpilih adalah FEM. Kedua, uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dengan REM. Keputusan memilih penggunaan FEM atau REM, dilakukan dengan memperhatikan nilai *probability cross-section random* (p-value) yang dihasilkan. Jika nilai *p-value* $<$ nilai alpha (taraf signifikan), maka dipastikan pendekatan regresi data panel yang tepat adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai *p-value* yang dihasilkan $>$ nilai alpha (taraf signifikan), maka dipastikan pendekatan regresi data panel yang tepat adalah REM.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel level kabupaten/kota di Papua Barat periode 2017 s.d 2021 yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat. Tabel 2 berisikan informasi yang teridentifikasi dari data, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Papua Barat yaitu sebesar 5,14 persen. Periode fiskal tahun 2017 s.d 2021, rata-rata penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua Barat yang bersumber dari DAK yaitu sebesar Rp137 milyar.

Selain penerimaan daerah yang bersumber dari DAK, daerah kabupaten/kota di Papua Barat juga menerima transfer Pemerintah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DOK). Rata-rata jumlah penerimaan daerah kabupaten/kota di Papua Barat yang bersumber dari DBH tercatat yaitu Rp137 milyar. Begitu pula dengan belanja daerah yang bersumber dari penerimaan DOK untuk kabupaten/kota di Papua Barat yaitu sebesar Rp127,54 milyar. Sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang merepresentasikan investasi fisik dan masuk ke daerah, dan telah dikapitalisasi menjadi aset tetap dalam bentuk PMTB, tercatat rata-rata untuk kabupaten/kota di Papua Barat yaitu sebesar Rp898,18 milyar.

Data partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja tingkat kabupaten/kota di Papua Barat, tercatat rata-rata sebesar 71,96 persen. Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) yang merepresentasikan kualitas sumber daya manusia, rata-rata pada tingkat kabupaten/kota di Papua Barat yaitu sebesar 61,90 persen.

Tabel 2. Deskripsi Statistik

Variabel (1)	Mean (2)	Standar Deviasi (3)	Minimum (4)	Maksimum (5)
Egrowth (%)	5.14	2.04	-0.01	10.63
dak (Milyar, Rp)	137	583,10	98,15	850.62
dok (Milyar, Rp)	127,54	255.88	105.20	385.5
dbh (Milyar, Rp)	137	471	110	310
pmtb (Milyar, Rp)	898,18	127,78	229.35	1.88
Ipm (%)	61.90	6.61	49.77	77.98
labor (%)	71.96	8.29	56.97	91.7

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Catatan: jumlah observasi sebanyak 65; variabel terikat: pertumbuhan ekonomi (egrowth); variabel bebas: dana alokasi khusus (dak); variabel kontrol: dana otonomi khusus (dok), dana bagi hasil (dbh), pembentukan modal tetap bruto (pmtb), indeks pembangunan manusia (ipm), dan partisipasi angkatan kerja (labor).

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Tabel 3 sampai dengan Tabel 4 merupakan hasil perhitungan guna memastikan model regresi data panel yang digunakan, untuk menganalisis pengaruh variabel utama (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahapan awal dilakukan terhadap uji Chow dimana hasilnya menunjukkan bahwa nilai *p-value* atau Prob > F yang dihasilkan yaitu 0.0014 atau < nilai alpha 0.05, sehingga model yang sesuai yaitu FEM, seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

```

. xtreg egrowth ldak ldbh ldok ipm lpmtb labor, fe
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =       65
Group variable: kab                   Number of groups =       13

R-sq:                                Obs per group:
    within = 0.1478                    min =           5
    between = 0.0047                   avg =          5.0
    overall = 0.0089                   max =           5

corr(u_i, Xb) = -0.8850                F(6,46)         =       1.33
                                          Prob > F        =       0.2634

```

egrowth	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ldak	-2.254326	1.448816	-1.56	0.127	-5.17064 .6619884	
ldbh	-22.9592	16.47353	-1.39	0.170	-56.11869 10.20029	
ldok	10.36258	8.002693	1.29	0.202	-5.74601 26.47116	
ipm	-.3191425	.5663554	-0.56	0.576	-1.459157 .8208718	
lpmtb	2.167827	3.135005	0.69	0.493	-4.14261 8.478264	
labor	.0662441	.0623765	1.06	0.294	-.0593132 .1918015	
_cons	186.6703	187.4437	1.00	0.325	-190.6344 563.975	
sigma_u	3.4664369					
sigma_e	1.536914					
rho	.83571727	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(12, 46) = 3.38 Prob > F = 0.0014

Sumber: Data diolah penulis dengan Stata, 2023

Sementara hasil uji Hausman pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai *p-value* atau $\text{prob} > \chi^2$ yang diperoleh yaitu sebesar 0.7830 atau $>$ nilai alpha 0.05. Ini menunjukkan bahwa model yang sesuai dan tepat untuk digunakan yaitu REM (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

```
. hausman fe re
```

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt (diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe	(B) re		
ldak	-2.254326	-2.373633	.1193068	.7168349
ldbh	-22.9592	-7.476677	-15.48252	15.14437
ldok	10.36258	2.888524	7.474052	7.258265
ipm	-.3191425	.1138235	-.4329661	.5578865
lpmtb	2.167827	-.3988337	2.56666	3.037122
labor	.0662441	.049733	.0165111	.0330775

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\text{chi2}(6) = (b-B)' [(V_b-V_B)^{-1}] (b-B)$$

$$= 3.20$$

$$\text{Prob}>\text{chi2} = 0.7830$$

Sumber: Data diolah penulis dengan Stata, 2023

Mengingat hasil uji Chow dan uji Hausman merekomendasikan penggunaan model regresi data panel yang berbeda, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan uji *Lagrange Multiplier*. Hasilnya uji lagrange multiplier menunjukkan bahwa nilai prob > chibar2 yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0006 atau < alpha 0,05. Hasil ini menyiratkan bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah REM. Dengan mempertimbangkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, maka disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan yaitu *random effect model* (REM).

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

```

. xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

egrowth[kab,t] = Xb + u[kab] + e[kab,t]

Estimated results:

```

	Var	sd = sqrt(Var)
egrowth	4.177927	2.043998
e	2.362105	1.536914
u	2.436103	1.560802

```

Test:   Var(u) = 0
        chibar2(01) =    10.56
        Prob > chibar2 =    0.0006

```

Sumber: Data diolah penulis dengan Stata, 2023

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi digunakan untuk memenuhi persyaratan statistik dalam model analisis regresi berganda yang menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS). Namun, hasil uji terhadap pemilihan model yang sesuai untuk model regresi data panel guna melihat pengaruh variabel prediktor/terikat terhadap variabel respon/tidak terikat, dimana model regresi data panel yang sesuai yaitu *random effects model* (REM). Oleh karenanya, tidak dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap model regresi dalam penelitian ini, dikarenakan pendekatan REM telah menggunakan teknik estimasi *generalized least square* (GLS).

Pendekatan GLS dipercaya dapat mengatasi potensi adanya autokorelasi runtun waktu (time series) dan adanya korelasi antar observasi (cross section). Selain itu, teknik GLS juga dapat menghasilkan estimator untuk memenuhi aspek *best linear unbiased estimation* (BLUE), dan dapat juga dijadikan sebagai tritmen untuk mengatasi potensi permasalahan homokedastisitas dan autokorelasi (Baltagi, 2013).

Hasil Estimasi Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel utama dalam penelitian yang digunakan untuk melihat hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu transfer dana perimbangan yang diterima oleh Papua Barat dalam bentuk DAK. Sesuai dengan peruntukannya, DAK diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik di daerah, yang diharapkan dapat menunjang aktivitas

perekonomian di daerah dan ditandai melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel tidak terikat (variabel utama dan variabel kontrol) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang kuat ditunjukkan dengan nilai prob > chi2 yang diperoleh sebesar 0,000 atau < nilai alpha (0,005). Ini menunjukkan bahwa, pilihan variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai variabel tidak terikat (baik variabel utama maupun variabel kontrol), memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Tabel 6. Hasil Estimasi Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat

Variabel	Regresi <i>Random Effect Model</i> (REM)
Variabel respon/terikat: egrowth	
Variabel prediktor utama: ldak	-2,373 ** (1,259)
Variabel kontrol: ldok	-7,477 (6,482)
ldbh	2,888 (3,370)
ipm	0,113 ** (0,097)
lpmtb	0,398* (0,777)
labor	0,049* (0,052)
Konstanta	78,413 (68,522)
Jumlah observasi	65
R square	0,225
Prob > Chi2	0,000

Sumber: Data diolah, 2023

Catatan: Variabel respon: pertumbuhan ekonomi (egrowth); Variabel prediktor utama: dana alokasi khusus setelah dilogaritmakan (ldok); Kumpulan variabel kontrol: dana otonomi khusus dilogaritmakan (ldok), dana bagi hasil dilogaritmakan (ldbh), indeks pembangunan manusia (ipm), pembentukan modal tetap bruto dilogaritmakan (lpmtb), dan partisipasi angkatan kerja (labor). Analisis data menggunakan teknik *random effects model*. Kolom (2): Hasil estimasi variabel prediktor utama dan variabel kontrol terhadap variabel respon. Angka dalam kurung merupakan *standars error*. Tanda (***), (**), dan (*) masing-masing menunjukkan level signifikansi 1 persen, 5 persen, dan 10 persen.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal yang menarik. Pertama, variabel utama yang direpresentasikan oleh belanja daerah yang bersumber dari penerimaan transfer dalam bentuk DAK, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Kedua, walaupun DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat,

namun menghasilkan arah hubungan yang berlawanan dan /atau negatif. Tanda negatif yang dihasilkan mengindikasikan bahwa, meningkatnya belanja daerah yang bersumber dari DAK sebesar 1 persen dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat sebesar 2,37 persen.

Pada penelitian ini, dilakukan kontrol terhadap beberapa variabel yang dipandang dapat memberikan kontribusi tidak langsung terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Diantara beberapa variabel yang dikontrol, variabel pembentuk modal tetap bruto (PMTB) yang telah dilogartmakan dan variabel indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Hasil menunjukkan bahwa, variabel PMTB yang telah ditransformasi dalam bentuk logaritma natural memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Ini menyiratkan bahwa meningkatnya aktivitas investasi di Papua sebesar 1 persen, dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen.

Begitu pula dengan kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana jika IPM di Papua Barat meningkat sebesar 1 persen, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat sebesar 1,13 persen. Demikian juga dengan variabel labor yang merepresentasikan partisipasi angkatan kerja, dimana jika angka partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 1 persen, maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat sebesar 0,4 persen.

PEMBAHASAN

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004). Sesuai nomenklturnya, DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi yang diperuntukkan untuk (i) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional, dan (ii) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK merupakan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum, dan juga kebutuhan yang merupakan komitmen dan /atau prioritas nasional.

Pelaksanaan DAK di daerah umumnya merujuk pada Peraturan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK di daerah. Tujuannya yaitu untuk mengatur pengelolaan DAK per bidang yang dilaksanakan secara swakelola, dan tidak membatasi nilai proyek dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Begitu pula dalam mengajukan usulan kegiatan,

Pemerintah Daerah tidak memiliki ruang untuk mengusulkan kegiatan yang akan didanai oleh DAK (walaupun pasal 162 UU Nomor 23 tahun 2004, memungkinkan daerah untuk mengajukan usulan). Pada tahapan ini, Pemerintah Daerah hanya berkewajiban menyediakan dan mengirimkan data tentang kondisi sarana dan prasarana yang bidang-bidang Pemerintahan yang secara Nasional memperoleh alokasi pembiayaan dari DAK. Sementara itu, Siswiyanti (2017) menyatakan bahwa transfer DAK ke daerah umumnya digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana, dan diharapkan dapat memperlancar akses dan distribusi aktivitas ekonomi di daerah, sehingga mampu menurunkan kemiskinan di daerah.

Peran DAK pada perekonomian yaitu melalui peningkatan belanja dan /atau pembiayaan pemerintah daerah, yang direpresentasikan melalui belanja modal pemerintah daerah. Penerimaan transfer DAK yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, dengan adanya DAK yang diterima oleh daerah, merupakan salah satu dari berbagai instrumen fiskal yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun DAK secara akumulatif memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi, namun secara parsial belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Ini ditandai dengan adanya arah hubungan negatif yang dihasilkan antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menyiratkan bahwa meningkatnya DAK dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Papua Barat. Tanpa membedahkan wilayah, hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa, transfer pusat yang diterima oleh daerah dalam bentuk DAK, belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah (Anwar et al., 2016; Jannah & Nasir, 2018; Nurhayati et al., 2019; Setyowati & Suparwati, 2012; Siswiyanti, 2017).

Belum efektifnya kontribusi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dikarenakan dua hal. Pertama, belanja DAK yang baik dilakukan daerah sejauh ini kurang dioptimalkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebagai misal, sektor lapangan usaha industri dan perdagangan serta sektor jasa. Kedua, Belum efektifnya kontribusi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, dikarenakan fokus utama hadirnya DAK yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu di daerah, namun harus disesuaikan dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketiga, banyaknya sub kegiatan baru yang didanai oleh Pemerintah Daerah melalui penerimaan DAK memberikan indikasi ketidakjelasan tujuan utama DAK. Keadaan ini

secara tidak langsung menggambarkan bahwa kebijakan pembiayaan melalui DAK dianggap sebagai rutinitas, dan bukan lagi merupakan kegiatan khusus untuk persoalan khusus. Keempat, ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan dan petunjuk teknis tahunan DAK sering terlambat diterbitkan. Selain itu, petunjuk pelaksanaan (juklat) dan petunjuk teknis (juknis) sering mengalami perubahan, karena kurang memperhatikan kebutuhan daerah. Kelima, pagu DAK yang diterima oleh daerah relatif kecil, jika dibandingkan dengan kebutuhan dan dampak yang diharapkan.

Keenam, penggunaan DAK selalu merujuk pada aturan perundang-undangan yang masih menekankan pada aspek fisik, sehingga kurang mengakomodasi kebutuhan terhadap pembangunan di daerah secara utuh utamanya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, yang secara langsung berkontribusi terhadap kinerja ekonomi di daerah. Akibatnya, daerah mengalami kendala penyerapan dan /atau memanfaatkan DAK sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ketujuh, penilaian proses dan dampak DAK terhadap indikator kesejahteraan Papua Barat belum dilaksanakan secara terintegrasi dan sistematis. Ini ditandai dengan belum adanya pedoman pengelolaan dan pemantauan DAK terpadu baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat.

Begitu pula, besaran transfer ke daerah untuk komponen DAK dapat dilakukan tergantung kapasitas fiskal APBN, sehingga tidak dapat dipastikan jumlah atau besarnya setiap tahun. Sementara di Papua Barat, aktivitas perekonomian daerah sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur yang dimiliki daerah kabupaten/kota di Papua Barat tidak merata antar daerah, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang memadai dan konsisten.

Selain peruntukkan penggunaan DAK di daerah yang terkadang belum mengakomodasi target pencapaian pembangunan di daerah, faktor infrastruktur ekonomi daerah yang tidak merata antar wilayah di Papua, kondisi geografis wilayah yang tidak mudah dijangkau menyebabkan tingginya biaya yang harus disediakan untuk pengadaan dan penyediaan infrastruktur ekonomi di daerah. Oleh karenanya, upaya Pemerintah untuk membantu membiayai beberapa urusan khusus di daerah melalui mekanisme pembiayaan DAK, belum memberikan dampak konkrit terhadap aktivitas perekonomian daerah kabupaten/kota di Papua.

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Fokus penelitian yaitu menganalisis konsekuensi belanja daerah yang bersumber dari DAK sebagai variabel prediktor utama, terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Guna memastikan hasil yang konsisten dari variabel DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, maka perluasan dan /atau kontrol dilakukan terhadap beberapa variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap perubahan hasil pada variabel pertumbuhan ekonomi, seperti variabel DBH, DOK, IMP, PMTB, dan Labor. Penelitian menggunakan data panel kabupaten/kota di Papua Barat periode 2017 s.d 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat. Data diolah dengan menggunakan software stata versi 16.

Hasil utama dari penelitian menunjukkan tiga hal yaitu (1) secara akumulatif, variabel tidak terikat (DAK dan kumpulan variabel kontrol) memiliki hubungan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Ini ditunjukkan dengan nilai Prob > Chi2 yang dimiliki sebesar 0.000 atau < nilai alpha 0.005. Namun, secara parsial, belanja Pemerintah Daerah yang bersumber dari DAK walaupun hasil uji statistik signifikan, namun tidak berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat; (2) DAK belum efektif memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, dikarenakan belanja DAK tidak dioptimalkan penggunaannya pada sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan peningkatan perekonomian di daerah seperti pada sektor lapangan usaha industri, perdagangan, dan sektor jasa; dan (3) belum efektifnya sumbangan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, dikarenakan daerah tidak diberikan diskresi (ruang) untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan prioritas daerah, yang dipandang oleh daerah dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.

Rekomendasi

Memperhatikan hasil dan pembahasan penelitian, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Papua Barat untuk mengoptimalkan belanja DAK, sehingga dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu (1) memastikan implementasi DAK berjalan sesuai dengan peruntukkan dan berorientasi pada fokus utama DAK, namun dapat juga memberikan diskresi (keleluasaan) kepada Pemerintah Daerah di Papua Barat untuk merumuskan tindakan-tindakan yang tepat agar dapat mencapai outcome yang ditetapkan; (2) diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih realistis dan

efektif untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah di Papua Barat. Sistem ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah memilih dan menentukan dengan efektif sasaran program dan kegiatan yang didanai melalui belanja DAK; dan (3) kepala daerah (Gubernur) dapat berperan penting dalam mengkoordinir alokasi DAK antar kabupaten/kota. Ini dikarenakan, Gubernur diasumsikan lebih memahami kebutuhan dan kekhususan kabupaten/kota dalam provinsinya, dan memberikan perhatian pada provinsi secara keseluruhan, dan tidak hanya pada kabupaten/kota tertentu. Hal ini penting dilakukan utamanya pada proyek-proyek investasi fisik seperti prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan. Bentuk peran yang dapat dilakukan oleh Gubernur yaitu memberikan diskresi dalam mengalokasikan DAK kepada kabupaten/kota dalam provinsi, tentunya keputusan ini dilakukan bersama dengan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kriteria tertentu.

Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian hanya memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara transfer fiskal yang diterima daerah dalam bentuk DAK, terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Keadaan ini dikarenakan keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian. Sementara pertumbuhan ekonomi di daerah tidak hanya dipengaruhi belanja Pemerintah Daerah di Papua Barat, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti pengeluaran per kapita, ekspor neto, dan modal insani, kelembagaan, dan sosial budaya masyarakat di Papua Barat.

Dengan demikian, disarankan pada penelitian dengan isu yang sama kedepan, agar dapat menggunakan dan /atau mengakomodasi data terkait pengeluaran per kapita, ekspor neto, modal insani, dan aspek kelembagaan, serta indikator sosial dan budaya. Dengan mengakomodasi variabel-variabel tersebut untuk dikontrol dalam model, diharapkan nilai estimator dari koefisien DAK yang dihasilkan konsisten, dan dapat merepresentasikan hubungan yang dihasilkan dari DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, L. M., Palar, W. S., & Sumuel, I. J. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 218–232.
- Apriliani, A. P., & Khoirunurrofik, K. (2020). The impact of special allocation fund (DAK) for health on achievements of health development performance in Indonesia. *Economies*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES8030072>
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01). <https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019>

- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01).
- Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis of Panel Data - Fifth Edition*. In *John Wiley & Sons*, 2013.
- Chyi, H., & Zhou, B. (2014). The Effects of Tuition Reforms on School Enrollment in Rural China. *Economics of Education Review*, 38, 104–123. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.11.003>
- Edo, S., Osadolor, N. E., & Dading, I. F. (2020). Growing external debt and declining export: The concurrent impediments in economic growth of Sub-Saharan African countries. *International Economics*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.11.013>
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact Evaluation in Practice, Second Edition*. In *Impact Evaluation in Practice, Second Edition*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0779-4>
- Hyman, J. (2017). Does Money Matter in the Long Run? Effects of School Spending on Educational Attainment. *American Economic Journal: Economic Policy*, 9(4), pp.256–280. <https://doi.org/10.1257/pol.20150249>
- Jannah, K., & Nasir. (2018). Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(2).
- Kirabo Jackson, C., Johnson, R. C., & Persico, C. (2016). The Effects of School Spending on Educational and Economic Outcomes: Evidence from School Finance Reforms. *Quarterly Journal of Economics*, 131(1), pp.157–218. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv036>
- koto, jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 192–209. <https://doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.633>
- Lafortune, J., Rothstein, J., & Schanzenbach, D. W. (2018). School Finance Reform and the Distribution of Student Achievement. *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(2), pp.1–26. <https://doi.org/10.1257/app.20160567>
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 83(1), pp.111–139. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>
- Litschig, S., & Morrison, K. M. (2013). The Impact of Intergovernmental Transfers on Education Outcomes and Poverty Reduction. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(4), pp.206–240. <https://doi.org/10.1257/app.5.4.206>
- Nurhayati, Zukhri, N., & Valeriani, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Perekonomian Daerah pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.33019/accounting.v1i1.2>
- Nurkhayat, A., Firdaus, M., & MULatsih, S. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705
- Rumere, V. (2022a). *Dampak Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan dari Dana Otonomi Khusus Terhadap Hasil Pendidikan dan Kesehatan di Papua*. etd.repository.ugm.ac.id.
- Rumere, V. (2022b). Konsekuensi Lama Tahun Pendidikan terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Manokwari. *Cakrawala Management Business Journal*, 5(2), 129–146. <https://doi.org/10.30862/cm-bj.v5i2.236>
- Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes. *Journal of Economics and Policy*, 15(2), 114–138. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301>

- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*, 9(1).
- Siagian, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Prodi Akuntansi*, 51(1).
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Sugiyanto, E., Suharyono, S., Digdowiseiso, K., Waluyo, T., & Setiawan, H. D. (2018). The effects of specific allocation fund (DAK) on local economic development: A Mixed method analysis on central Java Province, Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(8).
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19897.19.7.2018>

LAMPIRAN

Tabel 1. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel (1)	Deskripsi (2)	Sumber (3)
egrowth	Pertumbuhan ekonomi: persen	Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2021
dak	Dana Alokasi Khusus: rupiah	Dirjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu, RI), 2017 s.d 2021
ldak	Dana Alokasi Khusus telah ditransformasi dengan logaritma natural	
dok	Dana Alokasi Khusus: rupiah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua dan Papua Barat, 2017 s.d 2021
ldok	Dana Otonomi Khusus telah ditransformasi dengan logaritma natural	
dbh	Dana Bagi Hasil: rupiah	Dirjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu, RI), 2017 s.d 2021
ldbh	Dana bagi hasil telah ditransformasi dengan logaritma natural	
pmtb	Pembentukan Modal Tetap Bruto: rupiah	Badan Pusat Statistik (BPS), 2017 s.d 2021
lpmtb	Pembentukan Modal Tetap Bruto telah ditransformasi dengan logaritma natural	
ipm	Indeks Pembangunan Manusia: indeks	Badan Pusat Statistik (BPS), 2017 s.d 2021
labor	Partisipasi Angkatan Kerja: persen	Badan Pusat Statistik (BPS), 2017 s.d 2021

Tabel 2. Hasil Estimasi

```

. xtreg egrowth ldak ldbh ldok ipm lpmtb labor, re

Random-effects GLS regression           Number of obs   =           65
Group variable: kab                     Number of groups =           13

R-sq:                                   Obs per group:
    within = 0.0962                      min =           5
    between= 0.3474                      avg =           5.0
    overall= 0.2253                      max =           5

Corr (u_i, X) = 0 (assumed)              Wald chi2(6)    =           0.80
                                           Prob > chi2     =           0.0004

-----+-----
      egrowth |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|  [95% Conf. Interval]
-----+-----
      ldak | -2.373633   1.259053    -1.89  0.053   -4.841331   .0940656
      ldbh | -7.476677   6.482678    -1.15  0.249   -20.18249   5.229138
      ldok |  2.888524   3.370562     0.86  0.391   -3.717655   9.494703
      ipm  |  .1138235   .0975761     1.17  0.043   -.0774221   .3050691
      lpmtb |  .3988337   .777269    -0.51  0.054   -1.922253   1.124585
      labor |  .049733    .0528839     0.94  0.067   -.0539175   .1533835
      _cons |  78.41338   68.52263     1.14  0.252   -55.88851   212.7153

-----+-----
      sigma_u | 1.5608021
      sigma_e |  1.536914
      rho    | .50771106 (fraction of variance due to u_i)
-----+-----

```